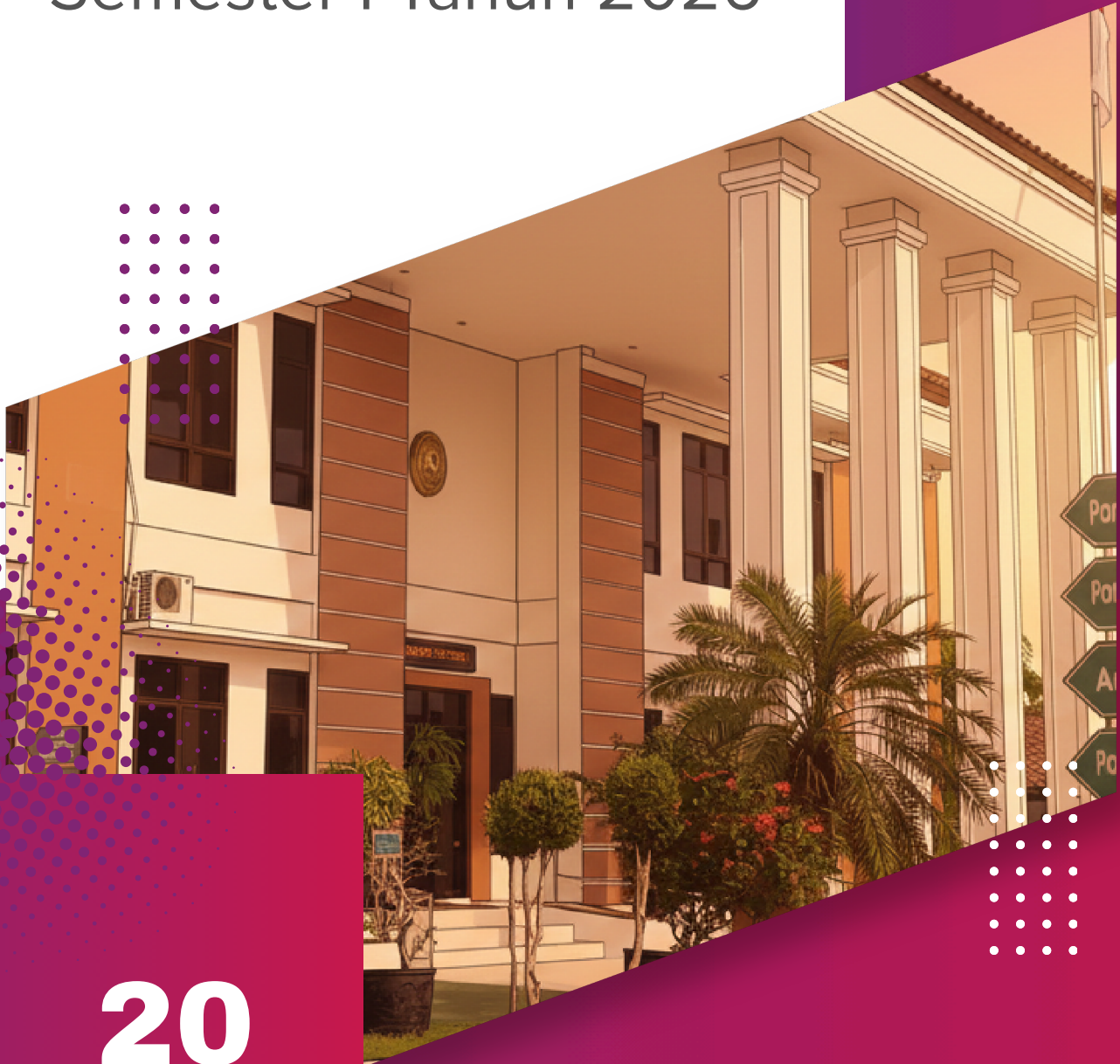


LAPORAN KEUANGAN

Semester I Tahun 2026



**20
26**

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
403092

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

**Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur II -
Sungailiat**

e-mail : pa.sungailiat@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSANADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

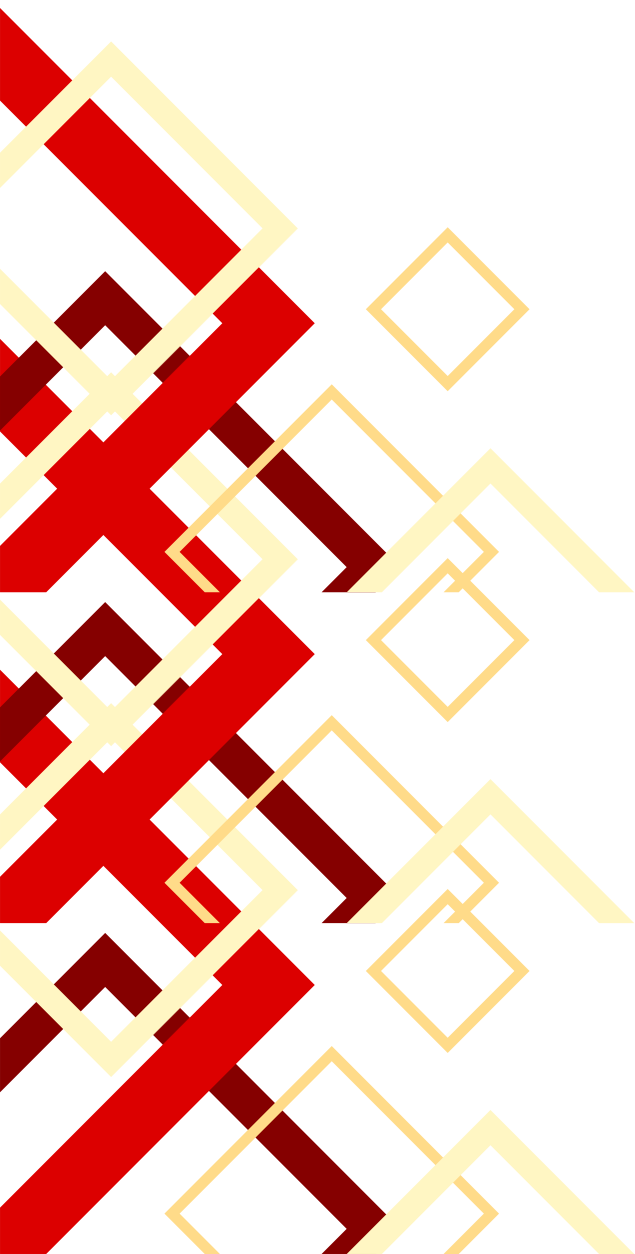
Jl. Jend. Ahmad YaniJalur II - Sungailiat

Telp. 0717-95079Fax. 0717-92518

Bangka - BangkaBelitung 33215

e-mail : pa.sungailiat@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



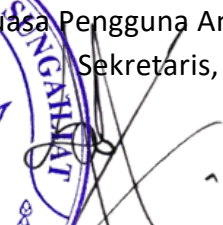
Kata Pengantar

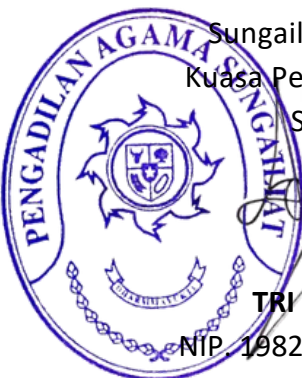
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sungailiat adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

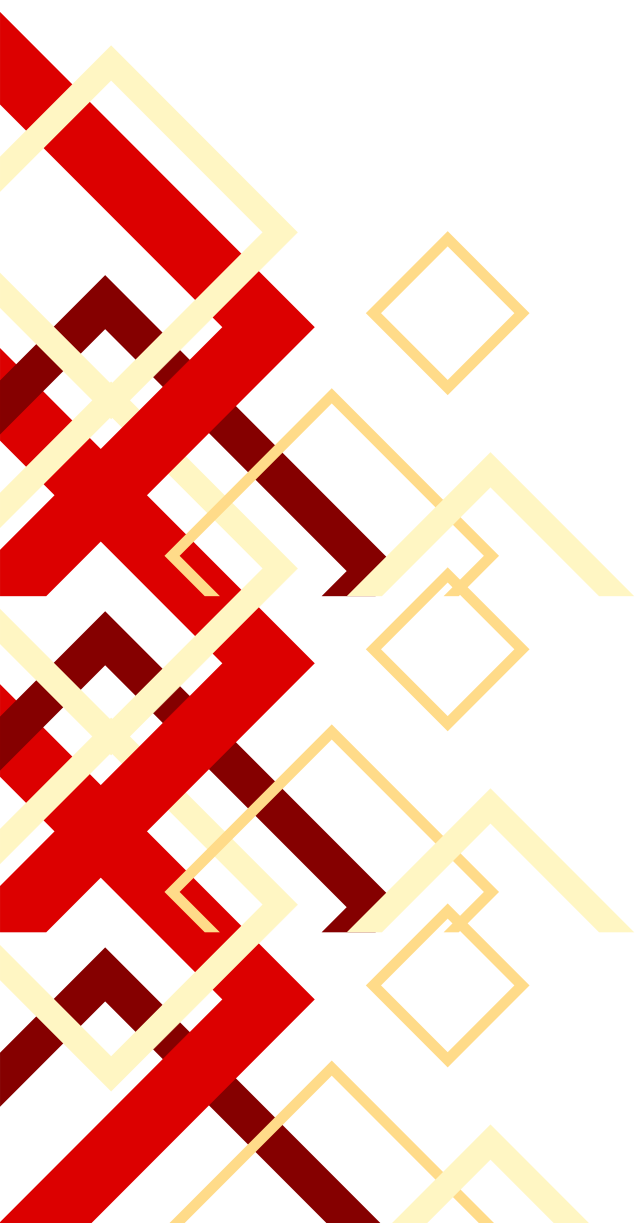
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungailiat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para emakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sungailiat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sungailiat, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

TRI LESTARI, S.E.
NIP. 19820905200604 2 003



DAFTAR ISI

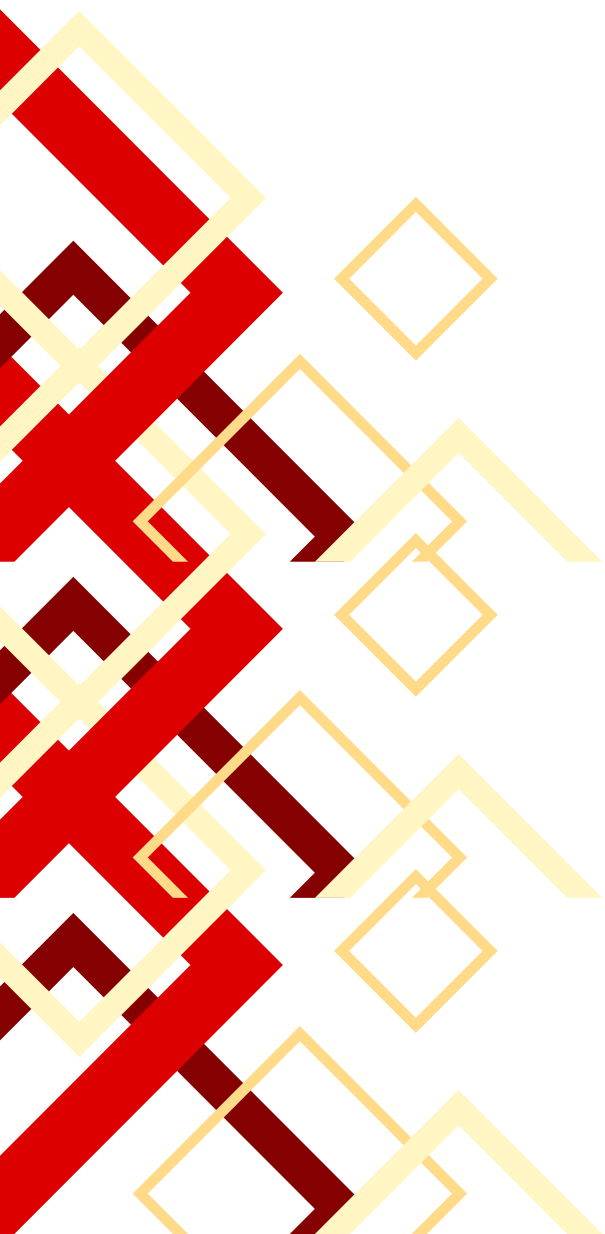


Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	vi
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungailiat	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4. Basis Akuntansi	14
A.5. Dasar Pengukuran	15
A.6. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.2. Aset Tetap	31
C.3. Aset Lainnya	35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.6. Ekuitas	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	37

D.2.	Beban Pegawai	38
D.3.	Beban Persediaan.....	39
D.4.	Beban Barang dan Jasa	39
D.5.	Beban Pemeliharaan	40
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	41
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.9.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	42
D.10.	Beban Lain-lain	42
D.11.	Kegiatan Non Operasional	43
D.12.	Pos Luar Biasa.....	43
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	43
E.1.	Ekuitas Awal	43
E.2.	Surplus (defisit) LO	43
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	44
E.4.	Koreksi Aset Tetap.....	44
E.5.	Koreksi atas Beban	44
E.6.	Koreksi atas Pendapatan	44
E.7.	Ekuitas Akhir	44
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	45
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	45
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	45
	Laporan-laporan Pendukung	46
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	

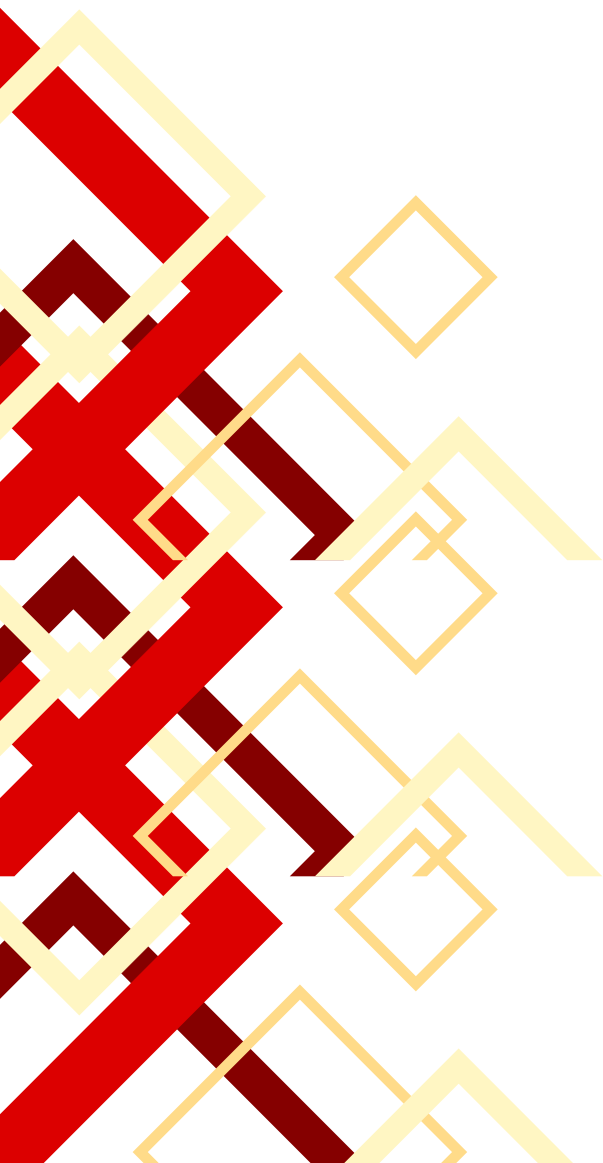
DAFTAR TABEL



Daftar Tabel dan Lampiran

TabelRingkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2026 dan 2025	x
TabelRingkasan Neraca per 30 Juni TA 2026 dan 2025	xi
TabelRingkasan Laporan Operasional per 30 Juni TA 2026 dan 2025	7
TabelRingkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni TA 2026 dan 2025	10
Tabel1Penggolongan Kualitas Piutang	21
Tabel2Tabel Masa Manfaat	22
Tabel3Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2026.....	24
Tabel4Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2026 dan 2025	25
Tabel5Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026	25
Tabel6Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026	26
Tabel7Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	26
Tabel8Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	27
Tabel9Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	28
Tabel10Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025	29
Tabel11Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	29
Tabel12Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember 2025	30
Tabel 13 Rincian Aset Tetap	31
Tabel14Rincian Saldo Tanah	32
Tabel15Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
Tabel18Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025	36
Tabel19Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2026	37
Tabel20Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025.....	38
Tabel21Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	39
Tabel22Rincian Beban Persediaan Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	39
Tabel23Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	40
Tabel24Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025 dan TA 2025	41
Tabel25Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	42
Tabel26Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025	43

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Agama Sungailiat

Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur II - Sungailiat Bangka - Bangka Belitung 33215

Telp. 0717-95079 Fax. 0717-92518 e-mail : pa.sungailiat@yahoo.co.id

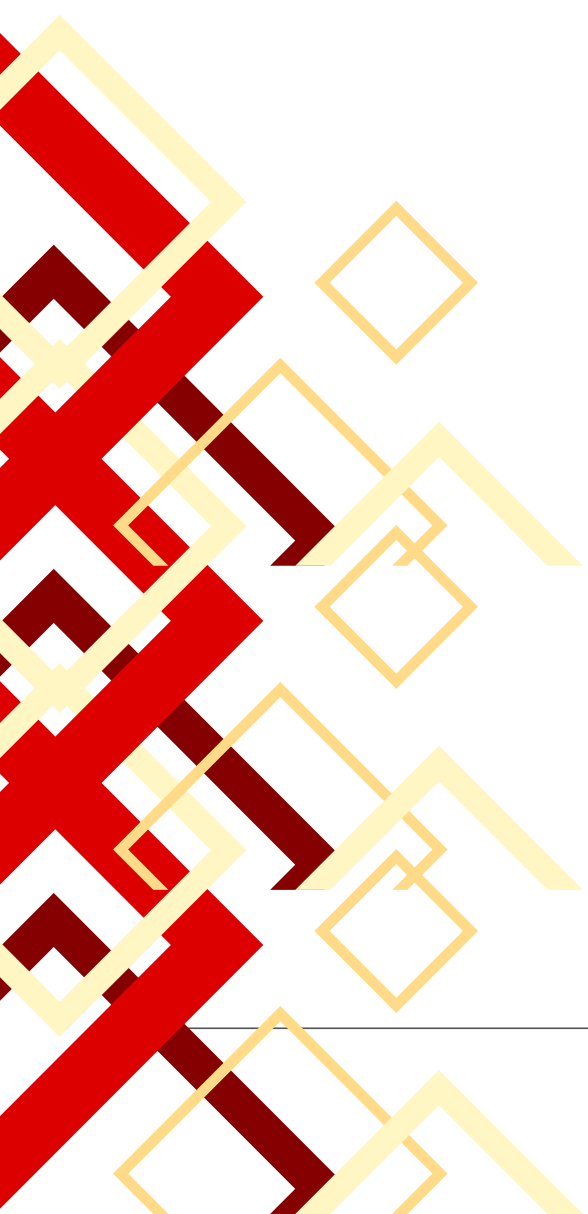
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungailiat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungailiat telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungailiat, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

TRI LESTARI, S.E.
NIP. 19820905 200604 2 003



Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.748.010 atau mencapai 50 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3.496.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2026 adalah sebesar Rp. 5.483.675.119 atau mencapai 59,4 persen dari anggarannya sebesar Rp. 9.231.420.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2026 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026			TA 2025
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	3.496.000	1.748.010	50	1.598.520
Belanja Negara	9.231.420.000	5.483.675.119	59,4	2.346.446.699

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 2025. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp 8.465.671.457, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 63.221.321, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 8.402.450.136, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyesisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 449.114.088 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 449.114.088 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp 8.016.557.369, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 8.016.557.369 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2026	2025	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	63.221.321	24.259.559	38.961.762	160,60
Aset Tetap	8.402.450.136	8.468.324.289	(65.874.153)	(0,78)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	8.465.671.457	8.492.583.848	(26.912.391)	(0,32)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	449.114.088	763.975.114	(314.861.026)	(41,21)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	449.114.088	763.975.114	(314.861.026)	(41,21)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	8.016.557.369	7.728.608.734	287.948.635	3,73
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	8.016.557.369	7.728.608.734	287.948.635	3,73
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	8.465.671.457	8.492.583.848	(26.912.391)	(0,32)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 2.000.581, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 5.195.979.055 sehingga terdapat surplus(defisit)dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 5.193.978.474). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0, jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 5.193.978.474).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp 7.728.608.734 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp (5.193.978.474) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 5.481.927.109. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp 8.016.557.369.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

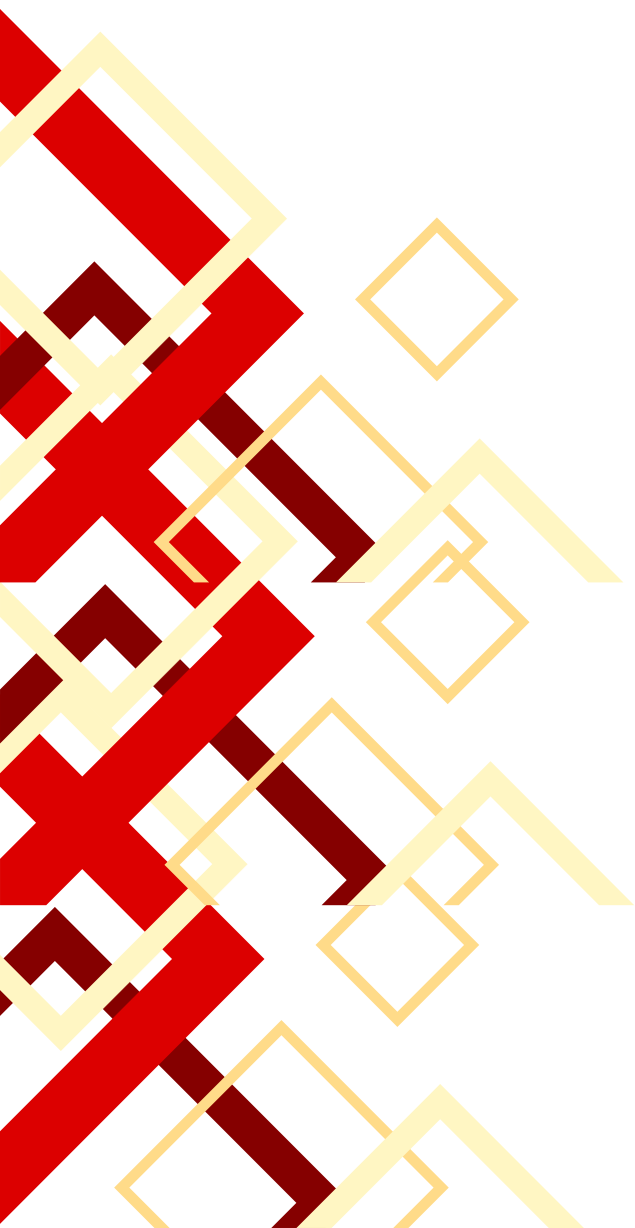
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2026			TA 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.496.000	1.748.010	50	1.598.520
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah						
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	7.881.176.000	4.785.929.117	61	1.881.872.354
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.310.169.000	657.745.998	50	464.574.345
3.	Belanja Modal	B.2.3.	40.075.000	40.000.004	0	0
Jumlah Belanja Negara						
			9.231.420.000	5.483.675.119	59	2.346.446.699

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN



II. Neraca

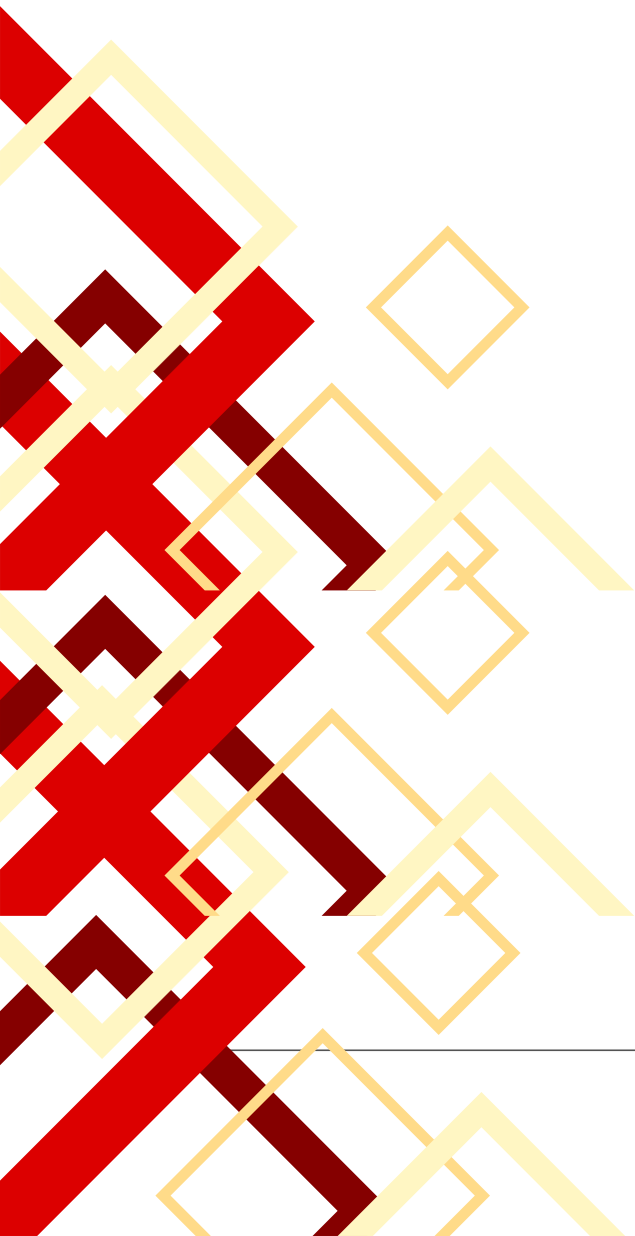
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
ASET			
Aset Lancar			
	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.11.	25.800.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1 2.	0	1.657.309
Piutang Bukan Pajak	C.13.	252.571	0
Persediaan	C.14.	37.168.750	22.602.250
Jumlah Aset Lancar		63.221.321	24.259.559
Aset Tetap			
	C.2		
Tanah	C.2.1.	4.188.815.000	4.188.815.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	2.972.942.531	2.932.942.527
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.173.973.000	5.173.973.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	927.109	927.109
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.5.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(3.934.207.504)	(3.828.333.347)
Jumlah Aset Tetap		8.402.450.136	8.468.324.289
Aset Lainnya			
	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		8.465.671.457	8.492.583.848
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	406.983.204	763.975.114
Utang yang belum ditagihkan	C.4. 2.	16.330.884	0

Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	25.800.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		449.114.088	763.975.114
Jumlah Kewajiban		449.114.088	763.975.114
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
	C.5		
Jumlah Ekuitas Dana		8.016.557.369	7.728.608.734
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		8.465.671.457	8.492.583.848

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL



III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2026 DAN 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.000.581	1.864.940
Jumlah Pendapatan		2.000.581	1.864.940
Beban			
Beban Pegawai	D.2	4.438.409.179	2.112.878.499
Beban Persediaan	D.3	8.199.000	17.936.200
Beban Barang dan Jasa	D.4	349.984.000	285.166.882
Beban Pemeliharaan	D.5	266.526.234	206.320.412
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.986.485	15.368.459
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	105.874.157	116.509.220
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
Jumlah Beban		5.195.979.055	2.754.179.672
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.193.978.474)	(2.752.314.732)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari kegiatan Non Operational Lainnya	D.12	0	0
Beban dari kegiatan Non Operational Lainnya		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(5.193.978.474)	(2.752.314.732)

Pos Luar Biasa	D.13	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(5.193.978.474)	(2.752.314.732)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

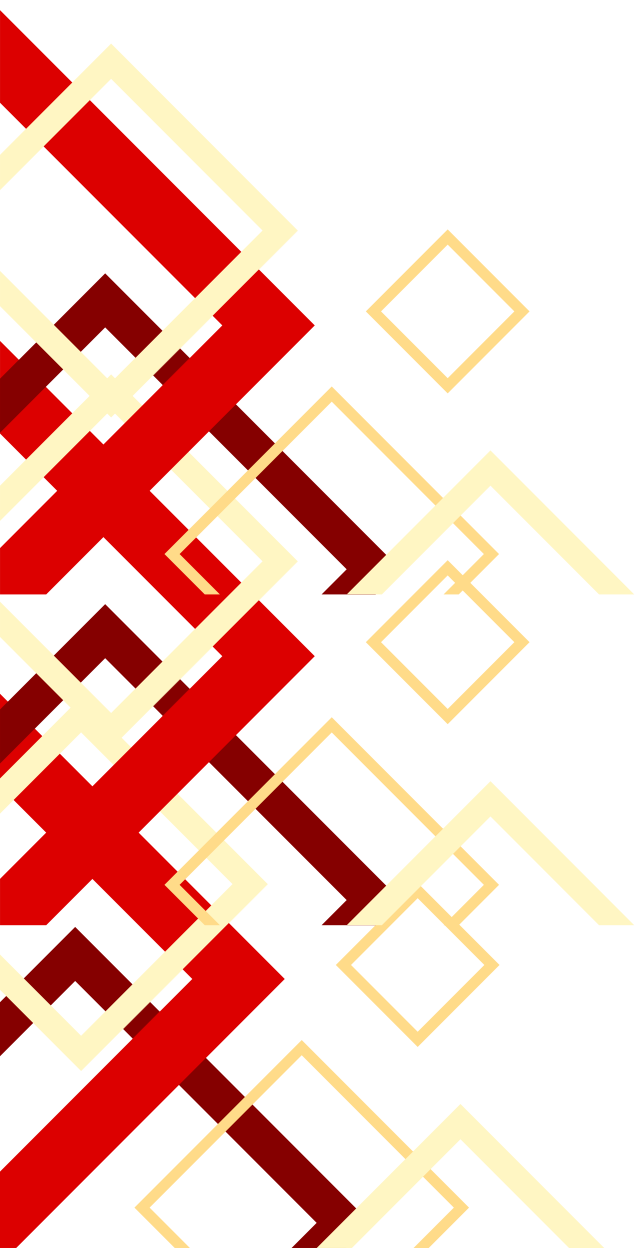
IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
Ekuitas Awal	E.1	7.728.608.734	8.697.683.157
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(5.193.978.474)	(2.752.314.732)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E.4	0	0
Koreksi Atas Beban	E.5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E.6	0	0
Koreksi Lain-lain	E.7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.8	5.481.927.109	2.344.848.179
Ekuitas Akhir		8.016.557.369	8.290.216.604

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungailiat

Pengadilan Agama Sungailiat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya laporan keuangan pemerintah pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pengadilan Agama Sungailiat berkomitmen dengan **Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sungailiat yang Agung”

Sedangkan **Misi** Pengadilan Agama Sungailiat adalah :

1. Menjaga keharmonisan Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungailiat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sungailiat melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan upaya mediasi
3. Peningkatan tertib administrasi perkara
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
7. Peningkatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama sungailiat.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SAKTI juga merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sungailiat adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

○ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

○ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan dengan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional

dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
1.748.010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 1.748.010 atau mencapai 50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.496.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungailiat adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	EstimasiPendapatan	Realisasi	%
1.	PendapatandariPemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.496.000	0	0,00
3.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1.748.010	0,00
4.	PenerimaanKembaliBelanjaPegawaiTahunAnggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5.	PenerimaanKembaliPersekot/UangMukaGaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		3.496.000	1.748.010	50

Pada semester I tahun 2026 ini, Pengadilan Agama Sungailiat telah menetapkan estimasi pendapatan sebesar Rp 3.496.000, sehingga persentase pendapatan dibanding dengan realisasi tercapai sebesar 50%. Realisasi pendapatan semester I tahun 2026 sebesar Rp 1.748.010 yaitu Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2026 dan 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.598.520	0	0,00
3.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.748.010	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
	Jumlah	1.748.010	1.598.520	149.490	9,35

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
5.483.675.119

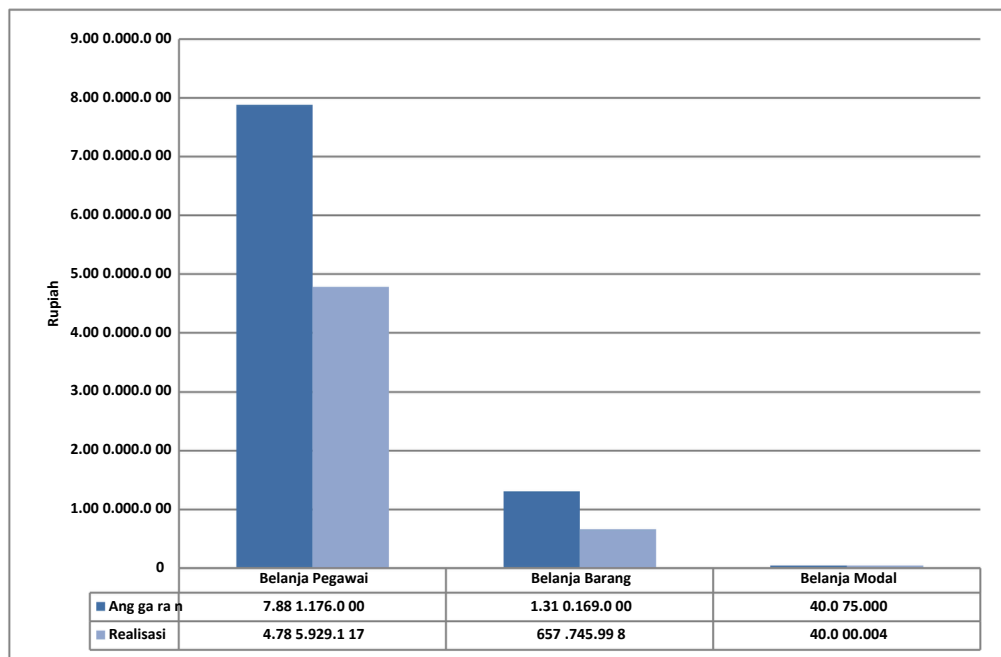
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp 5.483.675.119 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 59,4% dari anggaran senilai Rp 9.231.420.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.881.176.000	4.785.929.117	60,73
Belanja Barang	1.310.169.000	657.745.998	50,2
Belanja Modal	40.075.000	40.000.004	99,81
Total Belanja Bruto	9.231.420.000	5.483.675.119	59,4
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	9.231.420.000	5.483.675.119	59,4

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 2026

Pada tahun 2026 Pengadilan Agama Sungailiat tidak memperoleh alokasi anggaran belanja modal dari pusat. Perbandingan realisasi belanja TA 2026 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	4.785.929.117	1.881.872.354	2.904.056.763	154,32
Belanja Barang	657.745.998	464.574.345	193.171.653	41,58
Belanja Modal	40.000.004	0	0	0,00
Total Belanja	5.483.675.119	2.346.446.699	3.137.228.420	133,70

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp 4.785.929.117 dan Rp 1.881.872.354.

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
4.785.929.117

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun 2026, hal tersebut dikarenakan adanya mutasi pegawai .

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 JuniTA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
BelanjaGajiPokok PNS	624.213.940	629.648.560	(5.434.620)	(0,86)
BelanjaPembulatanGaji PNS	8.774	9.441	(667)	(7,06)
BelanjaTunj. Suami/Istri PNS	36.985.280	49.815.060	(12.829.780)	(25,75)
BelanjaTunj. Anak PNS	13.236.440	16.631.308	(3.394.868)	(20,41)
BelanjaTunj. Struktural PNS	20.800.000	20.800.000	0	0
BelanjaTunj. Fungsional PNS	31.640.000	31.665.000	(25.000)	(0,08)
BelanjaTunj. PPh PNS	4.643.141	5.530.398	(887.257)	(16,04)
BelanjaTunj. Beras PNS	32.444.160	37.658.400	(5.214.240)	(13,85)
BelanjaUangMakan PNS	67.491.000	64.662.000	2.829.000	4,38
BelanjaTunjanganUmum PNS	8.800.000	6.610.000	2.190.000	33,13
BelanjaTunjanganKemahalan Hakim	41.850.000	40.500.000	1.350.000	3,33
Belanja Tunj. PPH Pejabat Negara	790.605.700	157.542.196	633.063.504	401,84
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	2.959.100.000	820.800.000	2.138.300.000	260,51
BelanjaGajiPokok PPPK	109.250.250	0	109.250.250	0
BelanjaPembulatanGaji PPPK	2.261	0	2.261	0
BelanjaTunj. Suami/Istri PPPK	7.283.348	0	7.283.348	0
BelanjaTunj. Anak PPPK	2.549.172	0	2.549.172	0
BelanjaTunj. Beras PPPK	8.925.765	0	8.925.765	0
BelanjaUangMakan PPPK	18.270.000	0	18.270.000	0
BelanjaTunjanganUmum PPPK	7.830.000	0	7.830.000	0
Total BelanjaBruto	4.785.929.231	1.881.872.363	2.904.056.868	619
PengembalianBelanja	114	0	0	0
Total BelanjaNetto	4.785.929.117	1.881.872.363	2.904.056.868	619
			(86)	0

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
657.745.998

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp 657.745.998 dan Rp 464.574.345.

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan realisasi belanja barang pada Pengadilan Agama Sungailiat semester I tahun 2026 dikarenakan adanya penurunan pada belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan BelanjaBarangper30JuniTA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	294.058.475	249.107.700	44.950.775	18,04
Belanja Barang Non Operasional	1.740.000	1.000.000	740.000	74,00
Lainnya				
Belanja Barang Persediaan	24.910.500	16.186.500	8.724.000	53,90
Belanja Jasa	60.290.188	7.800.374	52.489.814	672,91
BelanjaPemeliharaan	254.971.234	175.111.312	79.859.922	45,61
BelanjaPerjalananDinas	21.775.601	15.368.459	6.407.142	41,69
Total BelanjaBrutto	657.745.998	464.574.345	193.171.653	41,58
PengembalianBelanja	0	0	0	0
Total BelanjaNetto	657.745.998	464.574.345	193.171.653	41,58

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
63.221.321

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 63.221.321 dan Rp 24.259.559. Aset lancer merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 10 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	TA 2025	TA 2024
1.	Kas di BendaharaPengeluaran	25.800.000	0
2.	Belanja dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	0	1.657.309
3.	Piutang Bukan Pajak	252.571	0
4.	Persediaan	37.168.750	22.602.250
	Total AsetLancar	63.221.321	24.259.559

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.
25.800.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.800.000 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di BendaharaPengeluarandisajikandalamtabel di bawah :

Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2026	31 Desember TA 2025
1.	Tunai	9.469.116	0
2.	Kuitansi	16.330.884	0
3.	Selisih kas	0	0
	Jumlah	25.800.000	0

Saldo kas pada per 30 Juni 2026 sebesar Rp 25.800.000 yaitu berupa uang persediaan untuk keperluan belanja pada satker Pengadilan Agama Sungailiat, yang selanjutnya akan dilaporkan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara setiap akhir bulan.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di
Muka: Rp. 0*

BelanjaDibayar di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 1.657.309. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang

atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	30 Juni TA 2026	31 Desember TA 2025
1.	Penyimpanan Google Drive	0	148.000
2.	Langganan Web Hosting	0	799.200
2.	WA Blast	0	243.021
3.	Domain	0	18.500
3.	Aplikasi Design Canva	0	448.588
Total Belanja Dibayar Dimuka		0	1.657.309

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak: Rp 252.571*

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 252.571 dan Rp 0. Piutang bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.

C.1.4. Persediaan

*Persediaan: Rp
37.168.750*

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 37.168.750 dan Rp 22.602.250. Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember 2025

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Barang Konsumsi	31.088.750	21.019.250
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	6.080.000	1.583.000
4	Suku Cadang	0	0

5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		37.168.750	22.602.250

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp.
8.402.450.136*

Nilai AsetTetap per 30 Juni 2026 dan 2025 tersaji sebesar Rp 8.402.450.136 dan Rp. 8.468.324.289. AsetTetap yang tersaji merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

RincianAsetTetap per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalahsebagaiberikut

Tabel 13 Rincian Aset Tetap
(dalam satuanRupiah)

No.	Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan
1	Tanah	4.188.815.000	4.188.815.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.972.942.531	2.932.942.527	40.000.004
3	Gedung dan Bangunan	5.173.973.000	5.173.973.000	0
4	AsetTetapLainnya	927.109	927.109	0
5	KonstruksidalamPengerjaan	0	0	0
Jumlah		12.336.657.640	12.296.657.636	40.000.004
AkumulasiPenyusutan		(3.934.207.504)	(3.828.333.347)	(105.874.157)
Nilai BukuAsetTetap		8.402.450.136	8.468.324.289	(65.874.153)

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp 4.188.815.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 4.188.815.000 dan Rp 4.188.815.000.

Rinciंसaldotanah per tanggal 30 Juni 2026 adalahsebagaiberikut :

Tabel 14 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2010101001	2.75 5	500/Hak Pakai	MA RI	Rumah Negara	1.45 3.8 29. 000
2.	2010101001	568	498/Hak Pakai	MA RI	Rumah Negara	261. 130 .00 0
3.	2010202002	491	499/Hak pakai	MA RI	Rumah Negara	302. 082 .00 0
4.	2010101002	3.00 0	347/Hak pakai	MA RI	Kantor PA Sungailiat	1.64 8.5 52. 000
5.	2010102002	5.00 0	a.n Pemkab Bangka Selatan	-	Rencana Kantor PA Bangka Selatan	50.0 00. 000
6.	2010202002	5.77 1	-	-	Rencana Kantor PA Bangka Tengah	473.222.000
Jumlah						4.188.815.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
: Rp. 2.972.942.531

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 2.972.942.531 dan Rp 2.932.942.527.

Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	2.932.942.527
MutasiTambah	0
Belanja Modal	40.000.004
MutasiKurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	2.972.942.531
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	2.865.376.162
Nilai Buku 30 Juni 2026	107.566.369

Sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat mutasi tambah pada aset tetap berupa peralatan dan mesin pada semester I tahun 2026 yaitu terdapat belanja modal berupa peralatan dan mesin.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
5.173.973.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 5.173.973.000 dan Rp 5.173.973.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	5.173.973.000
Mutasi Tambah	0
Belanja Modal	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	5.173.973.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(1.068.831.342)
Nilai Buku 30 Juni 2026	4.105.141.658

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0.

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya:
Rp. 927.109*

Aset Tetap Lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.927.109 dan Rp. 927.109.

Tidak ada penambahan ataupun pengurangan pada Aset Tetap Lainnya berupa monografi per 30 Juni 2021.

Mutasi nilai AsetTetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	927.109
MutasiTambah	0
MutasiKurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	927.109
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	927.109

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
[3.934.207.504]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp(3.934.207.504) dan Rp (3.828.333.347).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuanRupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	4.188.815.000	0	4.188.815.000
2	Peralatan dan Mesin	2.972.942.531	(2.865.376.162)	107.566.369
3	Gedung dan Bangunan	5.173.973.000	(1.068.831.342)	4.105.141.658
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	AsetTetapLainnya	927.109	0	927.109
	Jumlah	12.336.657.640	(3.934.207.504)	8.402.450.136

Aset Lainnya:
Rp. 927.109

C.3. Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 927.109 dan Rp 927.109. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik kedalam aset lancar maupun aset tetap.

C.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Sungailiat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek :
Rp. 449.114.088

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 449.114.088 dan Rp 763.975.114. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga	406.983.204	763.975.114
Utang Yang Belum Ditagihkan	16.330.884	0
Uang Muka dari KPPN	25.800.000	0
Jumlah	449.114.088	763.975.114

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 406.983.204*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 406.983.204 dan Rp. 763.975.114. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (duabelasbulan).

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan:
Rp. 16.330.884*

Utang Yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing sebesar Rp 16.330.884 dan Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pihak Ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan Dokumen sumber BAST.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 25.800.000*

SaldoUangMukadari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 25.800.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas Rp.
8.016.557.369*

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 8.016.557.369 dan Rp 7.728.608.734. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2026 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar (Rp 314.861.026) dari nilai per 31 Desember TA 2025. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 449.114.088, sedangkan per 31 Desember TA 2025 tercatat sebesar Rp 763.975.114.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*PendapatanPNbp :
Rp 2.000.581*

D.1.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp 2.000.581 dan Rp 1.864.940. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPer 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.000.581	1.864.940	7,273
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.000.581	1.864.940	7,273

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai :
Rp. 4.438.409.179*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 4.438.409.179 dan Rp 2.112.878.499. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	701.014.940	715.638.620	(14.623.680)	(2,04)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.740	11.005	(1.265)	(11,49)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41.222.940	55.956.630	(14.733.690)	(26,33)
Beban Tunj. Anak PNS	14.646.808	18.674.898	(4.028.090)	(21,57)
Beban Tunj. Struktural PNS	23.400.000	23.400.000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	35.595.000	35.485.000	110.000	0,31
Beban Tunj. PPh PNS	4.706.946	5.577.080	(870.134)	(15,60)
Beban Tunj. Beras PNS	36.137.580	42.510.540	(6.372.960)	(14,99)
Beban Uang Makan PNS	67.491.000	64.662.000	2.829.000	4,38
Beban Tunjangan Umum PNS	9.900.000	8.075.000	1.825.000	22,60
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	47.250.000	47.250.000	0	0
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	666.686.991	172.237.735	494.449.256	287,07
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	2.617.500.000	923.400.000	1.694.100.000	183,46
Beban Gaji Pokok PPPK	124.319.250	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.577	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	8.287.948	0	0	0
Beban Tunj. Anak PPPK	2.900.782	0	0	0

Beban Tunj. Beras PPPK	10.156.905	0	0	0
Beban Uang Makan PPPK	18.270.000	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PPPK	8.910.000	0	0	0
Total Beban Bruto	4.438.409.293	2.112.878.508	2.325.530.785	110,07
Pengembalian Beban	114	9	105	0
Total Beban Netto	4.438.409.179	2.112.878.499	2.325.530.680	110,07
			(86)	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 8.199.000 dan Rp 17.936.200. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	8.199.000	17.936.200	(9.737.200)	(54,29)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	8.199.000	17.936.200	(9.737.200)	(54,29)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Jasa : Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 349.984.000 dan Rp 285.166.882. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban keperluan Perkantoran	272.328.084	252.797.718	19.530.366	7,73
Beban pengiriman surat dinas	55.000	0	55.000	0
Pos Pusat				
Beban Honor Operasional satker	20.050.000	23.250.000	(3.200.000)	(13,76)
Beban Barang Operasional Lainnya	4.175.000	0	4.175.000	0
Beban peralatan dan mesin- ekstrakomptabel	1.440.000	700.000	740.000	105,71
Beban langgan telepon	210.000	352.604	(142.604)	(40,44)
Beban langganan Air	2.623.640	2.097.660	525.980	25,07
Beban Sewa	7.547.570	5.668.900	1.878.670	33,14
Beban Langganan Listrik	41.254.706	0	41.254.706	0
Beban Bahan	300.000	300.000	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	349.984.000	285.166.882	64.817.118	22,73

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan: Rp
266.526.234

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 266.526.234 dan Rp 206.320.412. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.234.500	107.342.781	47.891.719	44,62
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.286.000	28.126.040	17.159.960	61,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.740.734	64.420.491	(679.757)	(1,06)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.265.000	6.431.100	(4.166.100)	(64,78)
Total Beban Pemeliharaan	266.526.234	206.320.412	60.205.822	29,18

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas :
Rp.26.986.485*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 26.986.485 dan Rp 15.368.459. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	26.986.485	15.368.459	11.618.026	75,60
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	26.986.485	15.368.459	11.618.026	75,60

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
: Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi : Rp
105.874.157*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 105.874.157 dan Rp 116.509.220. Beban Penyusutan

adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.126.307	56.761.370	(10.635.063)	(18,74)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.747.850	59.747.850	0	0
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	105.874.157	116.509.220	(10.635.063)	(18,74)

D.9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.10. Beban Lain-lain

*Beban Lain-lain :
Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.11. Kegiatan Non Operasional

*BebanKegiatan
Non Operasional :
Rp 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 26 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA2026 dan TA2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Surplus PenjualanAset Non Lancar	0	0	0	0
PenjualanAlatAngkutDarat	0	0	0	0
Surplus/(Defisit)darikegiatan Non Operasional	0	0	0	0
PenjualanAlat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) darikegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.12. Pos Luar Biasa

*BebanPos Luar
Biasa : Rp.0.*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*EkuitasAwal :
Rp.7.728.608.734*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.7.728.608.734 dan Rp 8.697.683.157.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)LO :
Rp(5.193.978.474)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp

(5.193.978.474) dan Rp (2.752.314.732) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan : Rp. 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset Tetap :
Rp.0.*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.5. Koreksi atas Beban

*KoreksiAsetBeban
: Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan : Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.7. Ekuitas Akhir

*EkuitasAkhir : Rp.
8.016.557.369*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 8.016.557.369 dan Rp 8.290.216.604.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca (30 Juni 2026).

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Per 30 Juni 2026 tidak ada pendapatan dan belanja secara Akrua.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sungailiat menggunakan rekening virtual dengan Nama rekening BPG 015 Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor rekening 653244030921000, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat. Saldo bank periode 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0.

F.2.4. Revisi DIPA

Pada semester I tahun 2026, Pengadilan Agama Sungailiat telah melakukan revisi DIPA sebanyak 12 (dua belas) kali.

URUTAN REVISI	TANGGAL REVISI	ALASAN REVISI
1	24 Desember 2025	Revisi Pusat
2	6 Januari 2026	Revisi POK
3	19 Januari 2026	Revisi POK
4	21 Januari 2026	Revisi POK
5	3 Februari 2026	Revisi POK
6	16 Februari 2026	Revisi Halaman III DIPA
7	23 Februari 2026	Revisi POK
8	9 April 2026	Revisi Pusat Penambahan Anggaran Belanja Pegawai
9	20 April 2026	Revisi POK

10	30 April 2026	Revisi Halaman III DIPA dan Revisi POK
11	17 Juni 2026	Revisi Pusat Penambahan Anggaran Belanja Barang
12	17 Juni 2026	Revisi POK

RalatSPM, SSBP, dan SSPB

PadaSemester I tahun 2026 ini tidak terdapat ralat SPM berkaitan dengan akun belanja pegawai dan akun pendapatan negara.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting yang dapat dilaporkan dalam laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Agama Sungailiat.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Sungailiat
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	0	0
2.	3.02 Alat Angkut	595,132,117	(595,132,117)	0
3.	3.03 Alat Bengkel	0	0	0
4.	3.04 Alat Pertanian	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor	341,537,004	(315,437,000)	26,100,004
6.	3.05 Alat Rumah Tangga	738,791,420	(704,249,420)	34,542,000
7.	3.06 Alat Studio	120.972.000	(120,972,000)	0
8.	3.06 Alat Komunikasi	36,322,600	(36,322,600)	0
9.	3.07 Alat Kedokteran	4,351,200	(3,480,960)	870,240
10.	3.07 Alat Kesehatan Umum	2,497,500	(1,998,000)	499,500
11.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
12.	3.09 Alat Khusus Kepolisian	0	0	0
13.	3.10 Komputer Unit	803,369,600	(800,244,600)	3,125,000
14.	3.10 Peralatan Komputer	329,969,090	(287,539,465)	42,429,625
15.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
16.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
17.	3.13 Alat Produksi	0	0	0
18.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
19.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
20.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
21.	3.17 Peralatan Proses Produksi	0	0	0
22.	3.18 Rambu-rambu	0	0	0
23.	3.19 Alat Olahraga	0	0	0
Total		2,972,942,531	(2,865,376,162)	107,566,369

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA AKRUAL*



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 403092 **PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:54 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/26 6:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,195,969,000	1,076,399,000	624,213,940	0	624,213,940	57.99	452,185,060
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,000	18,000	8,774	114	8,660	48.11	9,340
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	87,600,000	87,600,000	36,985,280	0	36,985,280	42.22	50,614,720
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	30,269,000	30,269,000	13,236,440	0	13,236,440	43.73	17,032,560
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,860,000	33,860,000	20,800,000	0	20,800,000	61.43	13,060,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	57,593,000	57,593,000	31,640,000	0	31,640,000	54.94	25,953,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	155,312,000	155,312,000	4,643,141	0	4,643,141	2.99	150,668,859
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	62,800,000	62,800,000	32,444,160	0	32,444,160	51.66	30,355,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	180,183,000	180,183,000	67,491,000	0	67,491,000	37.46	112,692,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,548,000	11,548,000	8,800,000	0	8,800,000	76.2	2,748,000
511157	Belanja Tunjangan Kehormatan Hakim	95,674,000	95,674,000	41,850,000	0	41,850,000	43.74	53,824,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,910,826,000	1,791,256,000	882,112,735	114	882,112,621	49.25	909,143,379
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	246,885,000	1,087,988,000	790,605,700	0	790,605,700	72.67	297,382,300
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,457,400,000	4,946,273,000	2,959,100,000	0	2,959,100,000	59.82	1,987,173,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,704,285,000	6,034,261,000	3,749,705,700	0	3,749,705,700	62.14	2,284,555,300
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	30,000	30,000	109,250,250	0	109,250,250	364,167.5	(109,220,250)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	9,000	2,261	0	2,261	25.12	6,739
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,000	30,000	7,283,348	0	7,283,348	24,277.83	(7,253,348)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30,000	30,000	2,549,172	0	2,549,172	8,497.24	(2,519,172)
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30,000	30,000	8,925,765	0	8,925,765	29,752.55	(8,895,765)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	55,500,000	55,500,000	18,270,000	0	18,270,000	32.92	37,230,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	30,000	30,000	7,830,000	0	7,830,000	26,100	(7,800,000)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	55,659,000	55,659,000	154,110,796	0	154,110,796	276.88	(98,451,796)
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,670,770,000	7,881,176,000	4,785,929,231	114	4,785,929,117	60.73	3,095,246,883
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	617,557,000	613,969,000	270,428,475	0	270,428,475	44.05	343,540,525
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,477,000	2,477,000	55,000	0	55,000	2.22	2,422,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,120,000	48,120,000	20,050,000	0	20,050,000	41.67	28,070,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,200,000	6,960,000	3,525,000	0	3,525,000	50.65	3,435,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESKELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 403092 **PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/07/26 8:54 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/7/26 6:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	675,354,000	671,526,000	294,058,475	0	294,058,475	43.79	377,467,525
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	66,660,000	55,132,000	24,910,500	0	24,910,500	45.18	30,221,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	66,660,000	55,132,000	24,910,500	0	24,910,500	45.18	30,221,500
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	122,232,000	101,782,000	50,127,856	0	50,127,856	49.25	51,654,144
522112	Belanja Langganan Telepon	3,000,000	3,000,000	273,462	0	273,462	9.12	2,726,538
522113	Belanja Langganan Air	19,200,000	19,200,000	3,159,000	0	3,159,000	16.45	16,041,000
522141	Belanja Sewa	22,120,000	12,040,000	6,729,870	0	6,729,870	55.9	5,310,130
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	166,552,000	136,022,000	60,290,188	0	60,290,188	44.32	75,731,812
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	208,800,000	223,320,000	155,234,500	0	155,234,500	69.51	68,085,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,670,000	45,286,000	45,286,000	0	45,286,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139,440,000	139,334,000	54,450,734	0	54,450,734	39.08	84,883,266
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	395,910,000	407,940,000	254,971,234	0	254,971,234	62.5	152,968,766
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,620,000	37,809,000	21,775,601	0	21,775,601	57.59	16,033,399
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	37,620,000	37,809,000	21,775,601	0	21,775,601	57.59	16,033,399
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,344,196,000	1,310,169,000	657,745,998	0	657,745,998	50.2	652,423,002
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,075,000	40,075,000	40,000,004	0	40,000,004	99.81	74,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	40,075,000	40,075,000	40,000,004	0	40,000,004	99.81	74,996
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	40,075,000	40,075,000	40,000,004	0	40,000,004	99.81	74,996
	JUMLAH BELANJA	5,055,041,000	9,231,420,000	5,483,675,233	114	5,483,675,119	59.4	3,747,744,881

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 403092 **PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/07/26 8:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,496,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas	0	1,748,010	0	1,748,010	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	3,496,000	1,748,010	0	1,748,010	50
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,496,000	1,748,010	0	1,748,010	50
	JUMLAH PENDAPATAN	3,496,000	1,748,010	0	1,748,010	50

*C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN,
NERACA, LAPORAN OPERASIONAL
DAN LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 403092 - PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 21/07/26 8:51

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	9,231,420,000	9,231,420,000	0
2	Belanja	5,483,675,233	5,483,675,233	0
3	Pengembalian Belanja	-114	-114	0
4	Estimasi Pendapatan	3,496,000	3,496,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,748,010	1,748,010	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	25,800,000	25,800,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,800,000	25,800,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM
Halaman : 1

iap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	25,800,000	0	25,800,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,657,309	(1,657,309)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	252,571	0	252,571	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	252,571	0	252,571	0.00
Persediaan	37,168,750	22,602,250	14,566,500	64.45
JUMLAH ASET LANCAR	63,221,321	24,259,559	38,961,762	160.60
ASET TETAP				
Tanah	4,188,815,000	4,188,815,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,972,942,531	2,932,942,527	40,000,004	1.36
Gedung dan Bangunan	5,173,973,000	5,173,973,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	927,109	927,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,934,207,504)	(3,828,333,347)	(105,874,157)	2.77
JUMLAH ASET TETAP	8,402,450,136	8,468,324,289	(65,874,153)	(0.78)
JUMLAH ASET	8,465,671,457	8,492,583,848	(26,912,391)	(0.32)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	406,983,204	763,975,114	(356,991,910)	(46.73)
Utang Yang Belum Ditagihkan	16,330,884	0	16,330,884	0.00
Uang Muka dari KPPN	25,800,000	0	25,800,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	449,114,088	763,975,114	(314,861,026)	(41.21)
JUMLAH KEWAJIBAN	449,114,088	763,975,114	(314,861,026)	(41.21)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,016,557,369	7,728,608,734	287,948,635	3.73
JUMLAH EKUITAS	8,016,557,369	7,728,608,734	287,948,635	3.73
JUMLAH EKUITAS	8,016,557,369	7,728,608,734	287,948,635	3.73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,465,671,457	8,492,583,848	(26,912,391)	(0.32)

Keterangan :
FINAL

SUNGAILIAT, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

TRI LESTARI, S.E
NIP 198209052006042003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,483,675,119
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,748,010	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,748,010
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	624,213,940	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,774	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36,985,280	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	13,236,440	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,800,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	31,640,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,643,141	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	32,444,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	67,491,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,800,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	41,850,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	790,605,700	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,959,100,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	109,250,250	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,261	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,283,348	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,549,172	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,925,765	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	18,270,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,830,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	270,428,475	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	55,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,525,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,910,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	50,127,856	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	273,462	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,159,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,729,870	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155,234,500	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45,286,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,450,734	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,775,601	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,000,004	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	114
JUMLAH			5,485,423,243	5,485,423,243

Keterangan :

FINAL

SUNGAILIAT, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
TRI LESTARI, S.E
198209052006042003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,800,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	252,571	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	31,088,750	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,080,000	0
0.0	131111	Tanah	4,188,815,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,972,942,531	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,173,973,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	927,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,665,376,162
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,068,831,342
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	406,983,204
0.0	219111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	16,330,884
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	25,800,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,483,675,119
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,748,010	0
0.0	391111	Ekuitas	0	7,728,608,734
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,000,581
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	701,014,940	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,512	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41,222,940	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,646,808	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	35,595,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,706,946	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,137,580	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	67,491,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,900,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	47,250,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	666,686,991	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,617,500,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	124,319,250	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,577	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,287,948	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,900,782	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	10,156,905	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	18,270,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,910,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	272,328,084	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	55,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,175,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	41,254,706	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	210,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,623,640	0
3.0	522141	Beban Sewa	7,547,570	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155,234,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45,286,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,740,734	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26,986,485	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46,126,307	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59,747,850	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,199,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,265,000	0
JUMLAH			17,597,606,026	17,597,606,026

Keterangan :

FINAL

SUNGAILIAT, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TRILESTARI, S.E

NIP. 198209052006042003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAI 403092

Tgl Data : 21/07/26 6:33 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM
Halaman : 1
lap_lrai_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,496,000	1,748,010	(1,747,990)	50	3,038,000	1,598,520	1,439,480	53
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan B-U	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara (Bukan Pajak Lainnya)	3,496,000	1,748,010	(1,747,990)	50	3,038,000	1,598,520	1,439,480	53
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,496,000	1,748,010	(1,747,990)	50	3,038,000	1,598,520	1,439,480	53
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	9,231,420,000	5,483,675,119	(3,747,744,881)	59	3,320,458,000	2,346,446,699	1,574,011,301	60
1. Belanja Pegawai	7,881,176,000	4,785,929,117	(3,095,246,883)	61	2,352,218,000	1,881,872,354	970,345,646	66
2. Belanja Barang	1,310,169,000	657,745,996	(652,423,002)	50	1,068,240,000	464,574,345	603,665,655	43
3. Belanja Modal	40,075,000	40,000,004	(74,996)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT 403092

Tgl Data : 21/07/26 6:33 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM
Halaman : 2
lap_lrai_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,231,420,000	5,483,675,119	(3,747,744,881)	59	3,920,458,000	2,346,446,699	1,574,011,301	60
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SUNGAILIAT, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

TRILESTARI, S.E
NIP. 198709052006042003

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,000,581	1,864,940	135,641	7.273
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,000,581	1,864,940	135,641	7.273
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,000,581	1,864,940	135,641	7.273
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,438,409,179	2,112,878,499	2,325,530,680	110.065
Beban Persediaan	8,199,000	17,936,200	(9,737,200)	(54.288)
Beban Barang dan Jasa	349,984,000	285,166,882	64,817,118	22.73
Beban Pemeliharaan	266,526,234	206,320,412	60,205,822	29.181
Beban Perjalanan Dinas	26,986,485	15,368,459	11,618,026	75.597
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%) (%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	105,874,157	116,509,220	(10,635,063)	(9.128)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,195,979,055	2,754,179,672	2,441,799,383	88.658
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,193,978,474)	(2,752,314,732)	(2,441,663,742)	88.713
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,193,978,474)	(2,752,314,732)	(2,441,663,742)	88.713
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,193,978,474)	(2,752,314,732)	(2,441,663,742)	88.713

Keterangan :

FINAL



SUNGAILIAT, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TRI LESTARI, S.E

NIP 198209052006042003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:54 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,726,606,734	6,697,663,157	(969,074,423)	(11.14)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,193,978,474)	(2,752,314,732)	(2,441,663,742)	88.71
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,481,927,109	2,344,848,179	3,137,078,930	133.79
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	287,948,635	(407,466,553)	695,415,188	(170.67)
EKUITAS AKHIR	8,016,557,369	8,290,216,604	(273,659,235)	(3.3)

Keterangan :

FINAL

SUNGAILIAT, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TRI LESTARI, S.E

NIP 198209052006042003

D. KERTAS KERJA TELAAH SATKER SEMESTER II TAHUN 2024

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2026**

Kode BA dan Nama K/L: (005) Mahkamah Agung RI

Kode Es1 dan Nama Es1: (01) Badan Urusan Administrasi

Kode Wilayah dan Nama Wilayah : (005.01.3000) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Kode Satker dan Nama Satker : (403092) Pengadilan Agama Sungailiat

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akruai	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK,		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak		✓	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal		✓	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya		✓	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah,	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar		✓	Tidak

2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun?		√	Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-		√	Ya/Tidak
3.	Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?	N/A	N/A	Ya
<i>Sehubungan terbitnya S-195/PB/2019 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah	N/A	N/A	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Tidak
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset		√	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset	N/A	N/A	Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas	N/A	N/A	Ya
<i>Saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162,		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau	N/A	N/A	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Ada/Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada	N/A	N/A	Ya
Jika bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			N/A
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			N/A

3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	N/A		
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu	N/A	N/A	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar		✓	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		Tidak	Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-		Ya	Ya
LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015).		✓	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		✓	Tidak
3.	Adakah beban bunga		✓	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		✓	Tidak
5.	Adakah beban hibah		✓	Tidak
6.	Adakah beban transfer		✓	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		✓	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya		✓	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	✓		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir	N/A	N/A	Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada,				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		✓	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas	✓		Sama
Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	N/A	N/A	Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal				
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang				
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
2.	Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		✓	Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan				
3.	Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2023 adakah		✓	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2022, Apakah demikian?	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka				
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	✓		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang		Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak

-	Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	✓	Ada	
-	Beban Penyisihan Piutang (di LO)	✓	Ada	
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang		Ada	Tidak	Seharusnya
3.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
-	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ada
Pengecekan persediaan		Ada	Tidak	Seharusnya
4.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	✓		Ada/Tidak
-	Beban Persediaan (di LO)	✓		Ada
-	491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		✓	Ada/Tidak
-	593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		✓	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap		Ada	Tidak	Seharusnya
5.	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	✓		Ada/Tidak
-	Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ada
-	Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi				
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos		Ada	Tidak	Seharusnya
6.	Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
7.	Adakah beban bansos?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau	✓		Ada/Tidak
-	Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		✓	Ada/Tidak
9.	Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	✓		Ada/Tidak
-	Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		✓	Ada/Tidak
10.	Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas	✓		Ada/Tidak
-	Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		✓	Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN		Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		✓	Tidak
2.	Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?		✓	Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"				
3.	Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal		✓	Tidak
4.	Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?		✓	Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK		✓	

MENU DAFTAR BMN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		✓	Tidak
2.	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	N/A		
3.	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)	N/A		
4.	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		✓	Tidak
5.	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	N/A		
6.	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)	N/A		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		✓	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak

Pengecekan TDK				
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif		✓	Tidak

2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo		✓	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		✓	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan		✓	Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif		✓	Tidak
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif		✓	Tidak

E-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2023 telah disesuaikan (Dinihilkan)?	✓		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar?	✓		

Cek Kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2023

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	✓		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian	✓		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		✓	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	✓		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?	✓	✓	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A	N/A	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	N/A	N/A	Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	✓		Sama

Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.

Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum,	N/A	N/A	Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah	N/A	N/A	Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A	N/A	Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb.,

6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A	N/A	Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan	N/A	N/A	Ya
8. Apakah belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan	N/A	N/A	Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	N/A	N/A	Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan	N/A	N/A	Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	N/A	N/A	Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus	N/A	N/A	Ya

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi Covid-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi		✓	
2. Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DPA terkait		✓	
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak		✓	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNPB)		✓	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan		✓	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan		✓	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak		✓	
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan		✓	

9.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan		✓	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak	
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer		✓	
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik		✓	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak	
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		✓	
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak Pandemi Covid-19		✓	
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak Pandemi Covid-19		✓	
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak Pandemi Covid-19		✓	
	a. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		✓	
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		✓	
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak Pandemi		✓	
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak Pandemi		✓	

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan,

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

TRI LESTARI

Sungailiat, 30 Juni 2026

Penelaah

ILHA

E. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA



LAPORAN BARANG KUASA PENGUNA (LBKP)

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Bagian Anggaran 403092

Semester I
Tahun Anggaran 2026



(0717) 92518



pa.sungailiat@yahoo.co.id

Jl. Jend. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec.
Sungailiat Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Agama Sungailiat sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Sungailiat. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Sungailiat, 20 Juli 2026

Sekretaris Pengadilan Agama Sungailiat
Selaku Kuasa Pengguna Barang



TRILESTARI



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

- 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA**
- 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026**
- 3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)**
- 4. Laporan Barang Persediaan**
- 5. Laporan Barang Intrakomptabel**
- 6. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- 7. Laporan Barang Gabungan**
- 8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 9. Laporan Aset Tak Berwujud**
- 10. Laporan Barang Bersejarah**
- 11. Laporan Barang Rusak Berat**
- 12. Laporan Barang Hilang**
- 13. Laporan Barang BPYBDS**
- 14. Laporan Barang Hibah DK/TP**
- 15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel**
- 16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel**
- 17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud**
- 18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)**
- 19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)**
- 20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara**
- 21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara**
- 22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara**

DATA TAMBAHAN

- 1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)**
- 2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya**
- 3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)**
- 4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan**
- 5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN**



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT) Semester I Tahun Anggaran 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Agama Sungailiat selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Agama Sungailiat selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Agama Sungailiat beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Audited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan LBKP *Semester I* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *Semester I* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP *Semester I* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan



- ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp. 8,439,618,886 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp. 8,490,926,539 dan mutasi tambah sebesar Rp. 51,307,653.
 3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp. 37,168,750 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp. 22,602,250 dan mutasi tambah sebesar Rp. 14,566,500.
 4. Mutasi tambah aset terjadi karena: Transfer Masuk BMN. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 41,440,004.
 5. Tidak ada Mutasi kurang aset. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp. 0.
 6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
 7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *Semester I* ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2026. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari



upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Agama Sungailiat telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Agama Sungailiat, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Sungailiat dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan



Barang Milik Negara;

- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan



Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 34) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 35) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 36) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Agama Sungailiat selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.**

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas



minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Agama Sungailiat, dalam LBKP Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh



Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Sungailiat. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp 12,360,329,640 (*dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta tigaratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 12,318,889,636 (*dua belas miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp. 41,440,004 (*empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah yaitu transaksi masuk BMN sebesar Rp. 41,440,004 (*empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;



12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 30 Juni 2026 menurut Pengadilan Agama Sungailiat adalah sebesar Rp 12,360,329,640 (*dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 12,336,657,640 (*dua belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 23,672,000 (*dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester 1 Tahunan Tahun Anggaran 2026

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
(Selanjutnya diisi sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran VI (halaman 192-217))

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 37,168,750 (*tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	31,088,750		



117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,080,000		
--------	--------------------------	-----------	--	--

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0 (*nol*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0 (*nol*) dan kondisi usang senilai Rp 0 (*nol*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 4,188,815,000 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 17,008 m² dengan nilai sebesar Rp 4,188,815,000 (*empat milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	0

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	0

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	17,008	4,188,815,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah (Jika Ada)

Realisasi belanja modal tanah per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.0.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 538 buah dengan nilai sebesar Rp 2,996,614,531 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 519 buah dengan nilai sebesar Rp 2,955,174,527 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebanyak 19 buah dengan nilai sebesar Rp 41,440,004 (*empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp. 595,132,117. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp. 595,132,117, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0.



meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	8	595,132,117
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 7. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

b. Alat Kantor (3.02)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 76 buah dengan nilai sebesar Rp 342,377,004 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 70 buah dengan nilai sebesar Rp 326,537,000, mutasi tambah sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp. 15,840,004 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0.

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel(Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KANTOR	15,000,004	840,000

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor



Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KANTOR	0	0

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	76	342,377,004
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 10. Kondisi Alat Kantor

c. Alat Rumah Tangga (3.03)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 audited per 30 Juni 2026 sebanyak 269 buah dengan nilai sebesar Rp 750,831,420 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 256 buah dengan nilai sebesar Rp 725,231,420, mutasi tambah sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp. 25,000,000 dan mutasi kurang sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp. 600,000.

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT RUMAH TANGGA	25,000,000	600,000

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT RUMAH TANGGA	0	0

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah



dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	269	750,831,420
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 13. Kondisi Alat Rumah Tangga

d. Alat Studio (3.04)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 audited per 30 Juni 2026 sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp 120,972,000 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp 120,972,000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT STUDIO	0	0

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT STUDIO	0	0

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio

Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	14	120,972,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0



Tabel 16. Kondisi Alat Studio

e. Alat Komunikasi (3.05)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 audited per 30 Juni 2026 sebanyak 47 buah dengan nilai sebesar Rp 42,790,600 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 47 buah dengan nilai sebesar Rp 42,790,600, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KOMUNIKASI	0	0

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KOMUNIKASI	0	0

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	47	42,790,600
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 19. Kondisi Alat Komunikasi

f. Alat Kedokteran (3.06)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 4,351,200 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 4,351,200, mutasi tambah sebanyak 0



buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KEDOKTERAN	0	0

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KEDOKTERAN	0	0

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, Saldo Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Kedokteran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	2	4,351,200
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 22. Kondisi Alat Kedokteran

g. Alat Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kesehatan Umum pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 2,497,500 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 2,497,500, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Kesehatan Umum tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KESEHATAN UMUM	0	0



Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Kesehatan Umum

Mutasi Kurang Alat Kesehatan Umum tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KESEHATAN UMUM	0	0

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Kesehatan Umum

Dari jumlah Alat Kesehatan Umum di atas, Saldo Alat Kesehatan Umum yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Kesehatan Umum berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	2,497,500
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 25. Kondisi Alat Kesehatan Umum

h. Alat Komputer Unit (3.08)

Komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 66 buah dengan nilai sebesar Rp 803,369,600. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 66 buah dengan nilai sebesar Rp 803,369,600, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
KOMPUTER UNIT	0	0

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
KOMPUTER UNIT	0	0



Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	66	803,369,600
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 28. Kondisi Komputer Unit

i. Alat Peralatan Komputer (3.09)

Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 55 buah dengan nilai sebesar Rp 334,293,090 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 55 buah dengan nilai sebesar Rp 334,293,090, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
PERALATAN KOMPUTER	0	0

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Komputer

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
PERALATAN KOMPUTER	0	0

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Komputer

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, Saldo Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Peralatan Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	55	334,293,090
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 31. Kondisi Peralatan Komputer

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungailiat Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 2,884,628,162 (*dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp. 2,865,376,162 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 19,252,000.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp 5,173,973,000 (*lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp 5,173,973,000 (*lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 (*not*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 (*not*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (401)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 4,305,704,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 4,305,704,000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.



Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0

Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0

Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	4,305,704,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 34. Kondisi Bangunan Gedung

b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (402)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 868,269,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 868,269,000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0

Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0

Tabel 36. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Tinggal berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	7	868,269,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 37. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungailiat Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 1,068,831,342 (*satu miliar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp 1,068,831,342 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp 0.



5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*nol*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0

Tabel 38. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0

Tabel 39. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungailiat Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*not*).

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*not*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*not*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*not*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*not*). Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Tabel 40. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Tabel 41. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*not*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*not*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*not*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai



Rp 0 (*noI*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*noI*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0



3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 42. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp 0 (*noI*) menjadi Rp 0 (*noI*).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*noI*).

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp 0 (*noI*) menjadi Rp 0 (*noI*).

8. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.



C. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 12,397,498,390 (*dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	37,168,750	100	0	0	37,168,750	100
	Sub Jumlah (1)	37,168,750	100	0	0	37,168,750	100
II	Aset Tetap						
1	Tanah	4,188,815,000	100	0	0	4,188,815,000	100
2	Peralatan dan Mesin	2,972,942,531	99,21	23,672,000	0,79	2,996,614,531	100
3	Gedung dan Bangunan	5,173,973,000	100	0	0	5,173,973,000	100
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	927,109	100	0	0	927,109	100
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	12,336,657,640	99,80	23,672,000	0,79	12,360,329,640	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	12,373,826,390	99,90	23,672,000	0,79	12,397,498,390	100

Tabel 43. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2,865,376,162	99,37	19,252,000	0,67	2,865,376,162	100
3	Gedung dan Bangunan	1,068,831,342	100	0	0	1,068,831,342	100
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	3,934,207,504	99,68	19,252,000	0,67	2,934,207,504	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	3,934,207,504	99,68	19,252,000	0,67	2,934,207,504	100

Tabel 44. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	37,168,750	37,168,750	0
1	Persediaan	37,168,750	37,168,750	0
II	Aset Tetap	12,360,329,640	12,360,329,640	0
1	Tanah	4,188,815,000	4,188,815,000	0



2	Peralatan dan Mesin	2,996,614,531	2,996,614,531	0
3	Gedung dan Bangunan	5,173,973,000	5,173,973,000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	927,109	927,109	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-(3,934,207,504)	-(3,934,207,504)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		8,439,618,886	8,439,618,886	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 45. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan <i>Audited</i> 2021	11.475.506.436	232.143.959	2,1 %
2	Laporan <i>Audited</i> 2022	11.505.189.136	29.682.700	0,25 %
3	Laporan <i>Audited</i> 2023	12.221.481.786	716.292.650	6,22 %
4	Laporan <i>Audited</i> 2024	12.323.461.336	101.979.550	0,82%
5	Laporan <i>Audited</i> 2025	12.341.491.886	18.030.550	0,14%
6	Laporan Semester 1 Tahun 2026	12.397.498.390	56.006.504	0.45%

Tabel 46. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Agama Sungailiat per Periode Laporan Semester 1 Tahun 2026

B. Informasi Pengelolaan BMN



1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	17,008	4,188,815,000
2	Alat Angkutan Bermotor	0	0	8	595,132,117
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	19	0	388	1,814,511,837
4	Peralatan dan Mesin TIK	0	0	121	1,137,662,690
5	Alat Berat	0	0	0	0
6	Bangunan Gedung	0	0	1	4,305,704,000
7	Rumah Negara	0	0	7	868,269,000
8	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0
11	Aset Tetap lainnya	0	0	12	927,109
12	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
JUMLAH		19	0	562	12,360,329,640

Tabel 47. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026

2. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat selama periode Semester 1 Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 48. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026

3. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0



3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

Tabel 49. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026

C. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0 sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

D. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

E. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Pemda setempat, BPN setempat, dan pihak ketiga terkait supaya tanah tersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut



betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

1. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Agama Sungailiat telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	-	-	-	-

Tabel 50. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Agama Sungailiat

2. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

VI. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Agama Sungailiat terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:



1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 51. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Agama Sungailiat

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 52. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Agama Sungailiat



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Agama Sungailiat telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungailiat selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Agama Sungailiat telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Station Wagon (Kendaraan Dinas Jabatan Ketua Kelas IB)	Disetujui
2	Pemeliharaan	Gedung dan Bangunan	Disetujui
3	Pemeliharaan	Peralatan Mesin TIK dan Non TIK	Disetujui
4	Pemeliharaan	Kendaraan	Disetujui
5	Pengadaan	Station Wagon (Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua Kelas IB)	Tidak Disetujui



6	Pengadaan	Station Wagon (Kendaraan Layanan Publik)	Tidak Disetujui
---	-----------	--	-----------------

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 6 usulan dan tidak disetujui sebanyak 2 usulan

Pada Tahun 2026 Pengadilan Agama Sungailiat juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk tahun 2027.

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungailiat yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp12,318,189,636. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp.41,440,004 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	17,008	4,188,815,000	17,008	4,188,815,000
Alat Angkutan Bermotor	0	0	8	595,132,117	8	595,132,117
Peralatan dan Mesin Non TIK	19	41,440,004	388	1,222,379,720	407	2,996,614,531
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	121	1,137,662,690	121	1,137,662,690
Alat Berat	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	0	0	1	4,305,704,000	121	4,305,704,000
Rumah Negara	0	0	7	868,269,000	7	868,269,000
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	0	0	12	927,109	12	927,109
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Total	19	41,440,004	17,547	Rp12.318.189.636	17,566	12,360,329,640



c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Agama Sungailiat telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan PSP di Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan PSP di Pengadilan Agama Sungailiat dengan nilai sebesar Rp.0, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Sungailiat telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang



menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Sungailiat telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp 0, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.

F. DATA PENDUKUNG LAINNYA

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 Juni 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403092 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	403092	Pengadilan Agama Sungailiat	Rp25.800.000	Rp0	BRI Cabang Sungailiat Nomor Rekening 653244030921000	Rp25.800.000	
JUMLAH					Rp25.800.000	Rp0		Rp25.800.000	

Sungailiat, 30 Juni 2026
Sekretaris,

TRI LESTARI, S.E.

PER 30 JUNI 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403092 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	-	-	-	-	NIHIL
JUMLAH					-	-	-	-	

Sungailiat, 30 Juni 2026

~~Sekretaris~~

TRI LESTARI, S.E.

RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 JUNI 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403092 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	-	-	-	-	NIHIL
JUMLAH					-	-	-	-	

Sungailiat, 30 Juni 2026
Sekretaris

TRI LESTARI, S.E.

RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 JUNI 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : 403092 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	-	-	-	-	NIHIL
JUMLAH					-	-	-	-	

Sungailiat, 30 Juni 2026
 Sekretaris

TRI LESTARI, S.E.

DAFTAR REKENING

PER 30 JUNI 2026

NO	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	SALDO PER 30 JUNI 2026
1	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	005	01	VA	653244030921000	BPG 015 PA Sungailiat	BRI Cabang Sungailiat	Rp0

Sungailiat, 30 Juni 2026


 Sekretaris

 TRI LESTARI, S.E.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT (403092)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653244030921000 | BPG 015 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Periode : 01-06-2026 s/d 30-06-2026

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-05	11:31:19	55042739	From 032901003295305 to 653244030921000 Pembayaran belanja barang berupa honorarium pengelola kegiatan/keuangan bulan Mei 2026 untuk 7 Orang 260150000019844000001	0,00	0,00	3.771.000,00	3.771.000,00	SPAN	
2026-06-09	13:41:41	55293900	REGULAR_65324_4030921000	3.771.000,00	3.771.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2026-06-12	13:23:49	55474192	From 032901003295305 to 653244030921000 Penggantian uang persediaan untuk belanja barang 260150000022057000001	0,00	0,00	25.699.011,00	25.699.011,00	SPAN	
2026-06-15	14:56:44	55599564	From 653244030921000 to - PENARIKAN transfer ke -	25.699.011,00	25.699.011,00	0,00	0,00	INDS	
2026-06-17	16:21:48	55683353	From 653244030921000 to 653244030921000 SETORAN_65324_4030921000 653244030921000 dari 653244030921000	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	BRIVA	
2026-06-22	11:00:10	55978792	From 653244030921000 to - BPG 015 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT transfer ke -	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	INDS	
			Total Mutasi		30.955.011,00	30.955.011,00			
			Saldo Akhir				0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-005.01.2.403092/2026

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (30.02) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB. BANGKA

KPPN : (015) Pangkal Pinang

Satuan Kerja : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT

Alamat dan No Telp : Jl. A. Yani Jalur Dua ,

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 9.469.116,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00037/SSP/403092/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	16.844.789,00	63.355.049,00	70.730.722,00	9.469.116,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	16.844.789,00	63.355.049,00	70.730.722,00	9.469.116,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	16.844.789,00	32.400.038,00	39.775.711,00	9.469.116,00
	1. BP UP*)	16.844.789,00	25.699.011,00	33.074.684,00	9.469.116,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	3.771.000,00	3.771.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	1.445.027,00	1.445.027,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 16.330.884,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	9.469.100,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	9.469.100,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	9.469.116,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	9.469.100,00
3. Selisih Kas	Rp.	16,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	9.469.116,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	16.330.884,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	25.800.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	25.800.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 16,00 karena tidak ada pecahan uang kecil
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



ILHA, S.KOM
NIP 198905152009122004

KAB. BANGKA, Juni 2026

Bendahara Pengeluaran



NUR ELVIRA AGUSTINA

NIP 199608072020032011

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 JUNI 2026

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUFAN	ALASAN PENUTUFAN
1	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	005	01	-	-	-	-	-	-

Sungailiat, 30 Juni 2026

Sekretaris

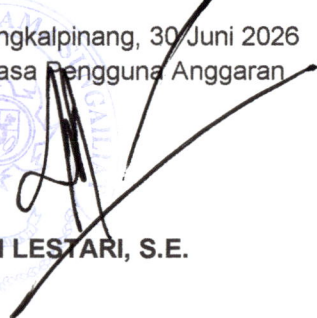
TRILESTARI, S.E.

REKAPITULASI DAFTAR REALISASI BELANJA MODAL DIBAWAH NILAI KAPITALISASI TAHUN 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : BANGKA BELITUNG
 SATKER : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

NO	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA MODAL DIBAWAH NILAI KAPITALISASI	Keterangan
1	Bangka Belitung	403092	Pengadilan Agama Sungailiat	NIHIL	

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Kuasa Pengguna Anggaran



TRI LESTARI, S.E.

**DAFTAR HIBAH PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
PER 30 JUNI 2026**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 403092 PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

NO	INFORMASI UMUM		KORWIL PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG										PEMBERI HIBAH					
			PENERIMAAN UANG MASUK REKENING TAHUN INI				PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPH/MPH/LBJ)						PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI					
	NOMOR REGISTER	1	TGL PENERIMAAN HIBAH	MATA UANG	NILAI	NOMOR REKENING	TGL PENGESAHAN	UANG	BARANG/JASA			NOMOR SPH/MPH/L	TGL PEMBERIAN HIBAH	UANG		BARANG / J/SA	NOMOR BAST	
								IDR	MATA UANG	VALAS	IDR			MATA UANG	NILAI	MATA UANG	VALAS	IDR
	NIHIL																	

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Secretaris

TRI LESTARI, S.E.
NIP. 19820905 200604 2 003

SATKER : (403092) PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

WILAYAH BANGKA BELITUNG

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
													Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
NIHIL															

Sungailiat, 30 Juni 2026

Sekretaris,

TRI LESTARI, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
Wilayah : 3000 Bangka Belitung
Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
No. Dokumen : 3
Tanggal : 1 April 2026
Tahun Anggaran : 2026
Keterangan : Jurnal Balik Awal Tahun Belanja Web Hosting

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja Barang Dibayar Dimuka	0	799.200
	522141	Belanja Sewa	799.200	0

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI



Ilha, S.Kom.

Disetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 4
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Awal Tahun Belanja Domain

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☒ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka	-	18.500
	522141	Beban Sewa	18.500	-

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI

Ilha, S.Kom.

Ilha, S.Kom.



Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
Wilayah : 3000 Bangka Belitung
Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
No. Dokumen : 5
Tanggal : 1 April 2026
Tahun Anggaran : 2026
Keterangan : Jurnal Balik Awal Tahun Belanja Penyimpanan Google Drive

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka	-	148.000
	521111	Belanja Sewa	148.000	-

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI


Ilha, S.Kom.

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran


Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
Wilayah : 3000 Bangka Belitung
Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
No. Dokumen : 6
Tanggal : 1 April 2026
Tahun Anggaran : 2026
Keterangan : Jurnal Balik Awal Tahun Belanja Aplikasi Design (Canva)

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka	-	448.588
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	448.588	-

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI



Ilha, S.Kom.

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 8
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Akrual Tagihan Telepon

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	63.462	-
	522112	Beban Langganan Telepon		63.462

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI



Ilha, S.Kom.

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 9
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Tagihan Listrik

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212112	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	8.873.150	-
	522111	Belanja Langganan Listrik		8.873.150

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI

Ilha, S.Kom.



Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 10
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Tagihan Air

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212112	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	535.360	-
	522113	Belanja Langganan Air		535.360

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI



Ilha, S.Kom.

Disetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 11
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Kekurangan Belanja Tunj. PPh

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	177.603.142	-
	511324	Belanja Langganan Air		177.603.142

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI



Ilha, S.Kom.

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran


 Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 12
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja WA Blast

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☒ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja Barang Dibayar Dimuka	0	243.021
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	243.021	0

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI

Ilha

Ilha, S.Kom.

Disetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Tri Lestari, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 403092 Pengadilan Agama Sungailiat
 No. Dokumen : 0004
 Tanggal : 1 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Kekurangan Gaji Pejabat Negara

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	576.900.000	0
	511339	Belanja Tunj. Pejabat Negara	0	576.900.000

Direkam Tanggal : 1 April 2026

Operator SAKTI

Ilha, S.Kom.

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Tri Lestari, S.E.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Jl. Jend. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung 33215
Telp. (0717) 92518 www.pa-sungailiat.go.id, pa.sungailiat@yahoo.co.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
Pada Pengadilan Agama Sungailiat
Periode Semester I - Tahun Anggaran 2026
Nomor : 70/SEK.PA.W28-A2/PL1.2.7/VII/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Sungailiat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Ridho Prastama Ramadhan, S.T.
NIP : 199812282025061011
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Ilha, S.Kom.
NIP : 198905152009122004
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Semester I - Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	8.490.926.539,00	(51.307.653,00)	8.439.618.886,00
A	ASET LANCAR	22.602.250,00	14.566.500,00	37.168.750,00
1	Persediaan	22.602.250,00	14.566.500,00	37.168.750,00
B	ASET TETAP	8.468.324.289,00	(65.874.153,00)	8.402.450.136,00
1	Tanah	4.188.815.000,00	-	4.188.815.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.932.942.527,00	40.000.004,00	2.972.942.531,00
3	Gedung dan Bangunan	5.173.973.000,00	-	5.173.973.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	927.109,00	-	927.109,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.828.333.347,00)	(105.874.157,00)	(3.934.207.504,00)
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	4.589.500,00	(169.500,00)	4.420.000,00
1	Ekstrakomptabel	22.232.000,00	1.440.000,00	23.672.000,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(17.642.500,00)	(1.609.500,00)	(19.252.000,00)
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	8.495.516.039,00	(51.477.153,00)	8.444.038.886,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun Anggaran 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

Ridho Prastama Ramadhan, S.T.
NIP. 199812282025061011

Operator GLP

Ilha, S.Kom.
NIP. 198905152009122004

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Agama Sungailiat



Tri Lestari, S.E.
NIP. 198209052006042003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Jl. Jend. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung 33215
Telp. (0717) 92518 www.pa-sungailiat.go.id, pa.sungailiat@yahoo.co.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : 53.A/SEK.PA.W28-A2/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Kode Satker : 005013000403092000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pengadilan Agama Sungailiat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia opname fisik persediaan :

1. Nama : Ilha, S.Kom.
NIP. : 198905152009122004
Jabatan : **Ketua**
2. Nama : Ridho Prastama Ramadhan, S.T
NIP. : 199812282025061011
Jabatan : **Anggota**

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan DIPA 01 Semester I Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan DIPA 01 ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Ilha, S.Kom.

.....

2. Ridho Prastama Ramadhan, S.T

.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Sungailiat

TRILESTARI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Jl. Jend. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung 33215
Telp. (0717) 92518 www.pa-sungailiat.go.id, pa.sungailiat@yahoo.co.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Kode Satker : 005013000403092000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih *)	Kondisi	
		Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
Pensil 2B	1010301001-000001	29	29	0	√	-
Pena Standar	1010301001-000002	61	61	0	√	-
Spidol Boardmarker	1010301001-000004	8	8	0	√	-
Spidol Permanent	1010301001-000005	22	22	0	√	-
Pena Balliner	1010301001-000008	68	68	0	√	-
Stabillo	1010301001-000011	20	20	0	√	-
Isi Stampel Tinta	1010301001-000012	1	1	0	√	-
Binder Clip Kecil	1010301003-000001	40	40	0	√	-
Trigonal Clip Paper Kecil	1010301003-000002	30	30	0	√	-
Binder Clip Sedang	1010301003-000004	1	1	0	√	-
Binder Clip Besar	1010301003-000005	9	9	0	√	-
Spring File Hijau	1010301003-000010	6	6	0	√	-
Trigonal Clip No. 3	1010301003-000015	22	22	0	√	-
Penghapus Pensil	1010301004-000002	55	55	0	√	-
Tipe-X	1010301004-000003	16	16	0	√	-
Buku Quarto	1010301005-000001	10	10	0	√	-
Buku Ekspedisi	1010301005-000002	14	14	0	√	-
Buku Kwintansi	1010301005-000005	5	5	0	√	-
Nota 3 Ply Kecil	1010301005-000007	2	2	0	√	-

Nota 3 Ply Besar	1010301005-000008	11	11	0	√	-
Kwitansi	1010301005-000009	4	4	0	√	-
Buku Kwitansi Kecil	1010301005-000012	2	2	0	√	-
Buku Folio 200 Halaman	1010301005-000013	2	2	0	√	-
Buku Folio 300 Halaman	1010301005-000014	4	4	0	√	-
Box File	1010301006-000005	28	28	0	√	-
Ordner 75 mm	1010301006-000011	40	40	0	√	-
Map Biola	1010301006-000015	53	53	0	√	-
Map Bludru	1010301006-000020	10	10	0	√	-
Map L A4	1010301006-000021	48	48	0	√	-
Ordner 50 mm	1010301006-000023	10	10	0	√	-
Map L F4	1010301006-000024	86	86	0	√	-
Penggaris	1010301007-000001	37	37	0	√	-
Cutter	1010301008-000001	30	30	0	√	-
Gunting	1010301008-000002	4	4	0	√	-
Gunting Kecil	1010301008-000005	6	6	0	√	-
Gunting Besa	1010301008-000006	9	9	0	√	-
Isi Cutter	1010301008-000003	10	10	0	√	-
Isolasi Kecil	1010301010-000004	7	7	0	√	-
Lakban Bening	1010301010-000005	9	9	0	√	-
lakban hitam besar	1010301010-000007	14	14	0	√	-
Double Tape Busa	1010301010-000016	19	19	0	√	-
Double Tape	1010301010-000011	11	11	0	√	-
Isolasi Sedang	1010301010-000014	9	9	0	√	-
Lem Stick	1010301010-000017	37	37	0	√	-
Stadler Kecil	1010301011-000001	3	3	0	√	-
Staples Kecil	1010301012-000001	19	19	0	√	-
Staples Sedang	1010301012-000002	1	1	0	√	-
Staples Besar	1010301012-000003	5	5	0	√	-

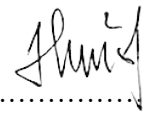
Pembuka Staple	1010301012 000004	9	9	0	√	-
Isi Staples 110	1010301013- 000001	24	24	0	√	-
Isi Staples Kecil	1010301013- 000003	40	40	0	√	-
Tali Name Tag	1010301015 000002	120	120	0	√	-
BINGKAI FOTO	1010301999 000005	6	6	0	√	-
Tempat Pensil / Pena	1010301999- 000007	1	1	0	√	-
Post it	1010301999- 000013	15	15	0	√	-
Sticky Note Sign here	1010301999 000018	48	48	0	√	-
Akrilik Nama	1010301999- 000021	10	10	0	√	-
Kalkulator	1010301999 000023	2	2	0	√	-
Kertas F4	1010302001- 000001	16	16	0	√	-
Kertas A4	1010302001- 000002	39	39	0	√	-
Kertas Buffalo	1010302002- 000007	3	3	0	√	-
Kertas Photo	1010302002- 000009	4	4	0	√	-
Kertas Double Mate	1010302002- 000011	4	4	0	√	-
Kertas Sticker Transparan	1010302002 000015	3	3	0	√	-
Jolly Facial Tissue Refill	1010302002- 000018	38	38	0	√	-
Tisu Nice Gulung	1010302002- 000025	40	40	0	√	-
Kertas Stiker Glossy	1010302002 000027	6	6	0	√	-
Label Tanda Tangan	1010302002- 000028	9	9	0	√	-
Amplop Coklat Kecil	1010302004- 000001	5	5	0	√	-
Amplop Putih Panjang	1010302004- 000003	2	2	0	√	-
Amplop Coklat Folio	1010302004- 000006	1	1	0	√	-
Amplop Putih Kecil	1010302004 000007	4	4	0	√	-
Plastik Bening	1010302999 000007	5	5	0	√	-
Plastik Loco Tebal	1010302999 000011	10	10	0	√	-
Catridge Canon Colour 810	1010304004- 000005	6	6	0	√	-
Blueprint Hitam	1010304004- 000006	9	9	0	√	-
Catridge Canon Colour 811	1010304004- 000007	7	7	0	√	-

Blueprint Warna	1010304004-000010	17	17	0	√	-
Tinta Canon 790 Hitam	1010304004-000013	2	2	0	√	-
Tinta Epson 003 Black	1010304004-000017	3	3	0	√	-
Tinta Epson 003 Colour	1010304004-000018	8	8	0	√	-
Tinta Suntik Hitam	1010304004-000020	5	5	0	√	-
Tinta Suntik Warna	1010304004-000021	5	5	0	√	-
USB WIRELESS TP-LINK	1010304006-000001	2	2	0	√	-
Flashdisk	1010304006-000002	11	11	0	√	-
Mouse Wireless Logitech	1010304010-000001	6	6	0	√	-
Mouse Kabel Logitech	1010304010-000002	2	2	0	√	-
Alas Mouse	1010304999-000004	10	10	0	√	-
Sapu Plastik	1010305001-000001	1	1	0	√	-
Sapu Plastik Besar	1010305001-000004	5	5	0	√	-
Kanebo	1010305002-000001	5	5	0	√	-
Pel	1010305002-000010	8	8	0	√	-
Plastik Sampah	1010305004-000003	22	22	0	√	-
Asoy Sampah	1010305004-000007	10	10	0	√	-
Plastik Asoi	1010305004-000008	5	5	0	√	-
Keset Jumbo	1010305004-000010	6	6	0	√	-
Gembok	1010305005-000004	2	2	0	√	-
Hand Soap	1010305008-000002	4	4	0	√	-
Wipoll	1010305008-000006	8	8	0	√	-
KIT Black Magic	1010305008-000010	1	1	0	√	-
Cling Kaca	1010305008-000012	4	4	0	√	-
Cling Kaca Refill	1010305008-000016	6	6	0	√	-
Wipoll Refill	1010305008-000017	13	13	0	√	-
Superpel Refill	1010305008-000018	5	5	0	√	-
Mama Lemon Refill	1010305008-000025	13	13	0	√	-
Yuri Handsoap Refill	1010305008-000027	5	5	0	√	-

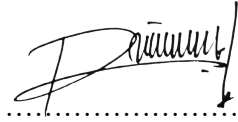
Soklin Lantai Refil	1010305008 000028	19	19	0	√	-
Mama Lemon Botol	1010305008 000029	5	5	0	√	-
Bayfresh Gantung	1010305012 000002	1	1	0	√	-
Stella All In One (Gantung)	1010305012 000009	22	22	0	√	-
Stella Pocket	1010305012 000016	10	10	0	√	-
Dahlia Freshgo	1010305012- 000039	5	5	0	√	-
Gelas Kopi	1010305999 000008	2	2	0	√	-
Kotak Tissue	1010305999 000034	5	5	0	√	-
Karpet	1010305999 000081	2	2	0	√	-
Kaki Dispenser	1010305999 000173	3	3	0	√	-
Pisau 18	1010305999 000176	1	1	0	√	-
Pisau	1010305999 000177	1	1	0	√	-
Lampu 18 W	1010306002 000007	4	4	0	√	-
Lampu 19 Watt	1010306002 000012	15	15	0	√	-
Lampu 15 W	1010306002 000013	25	25	0	√	-
Stop Kontak	1010306003 000001	3	3	0	√	-
Stop Kontak 4 Lubang 3 Meter	1010306003 000004	3	3	0	√	-
Batere Kotak	1010306010- 000001	30	30	0	√	-
Batere A2	1010306010 000003	24	24	0	√	-
Batere A3	1010306010 000004	24	24	0	√	-
Batere A2 Alkaline	1010306010- 000006	23	23	0	√	-
Batere A3 Alkaline	1010306010- 000007	25	25	0	√	-
Stempel	1010309003 000001	2	2	0	√	-

Tim Pelaksana Stock Opname :

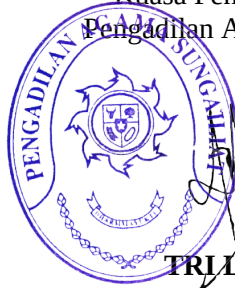
1. ILHA, S. Kom.

: 

2. RIDHO PRASTAMA RAMADHAN, S.T.

: 

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Sungailiat




TRILESTARI